



**Journal of Government Science Studies**  
Available online at <https://ojs3.unpatti.ac.id/>  
Vol. 2 No. 1, April 2023, pages: 45-50  
e-ISSN: 2827-847X, p-ISSN: 2827-8461  
<https://doi.org/10.53730>



## Efektivitas Sistem Transaksi Non Tunai dalam Layanan Parawisata di Kabupaten Sinjai

Salman <sup>a</sup>, Zulkifli Arifin <sup>b</sup>, Hasdinawati <sup>c</sup>

Correspondence Email: [salmanimm45@gmail.com](mailto:salmanimm45@gmail.com)

Manuscript submitted: 29-01-2023, Manuscript revised: 12-02-2023, Accepted for publication: 27-04-2023

### Keyword:

Effectiveness 1;  
Non-Cash Transaction  
System 2;  
Tourism Services 3.

**Abstract:** This study aims to determine the effectiveness of the non-cash transaction system in tourism services in Sinjai Regency. The research method is descriptive qualitative with data collection techniques carried out through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques were carried out by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. The research findings show that the effectiveness of the non-cash transaction system in tourism services is considered ineffective starting from the clarity of the goals to be achieved, the clarity of the strategy for achieving the goals, careful planning, proper programming, availability of facilities and infrastructure as well as monitoring and control systems. The implementation of non-cash transactions has not been effective in its implementation because it is still in the process of migrating from cash to non-cash and is constrained by a lack of human resources, lack of outreach and officials and visitors who do not understand how to do non-cash transactions.

### Kata Kunci:

Efektivitas 1;  
Sistem Transaksi Non  
Tunai 2;  
Layanan Parawisata  
3.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem transaksi non-tunai dalam layanan pariwisata di Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem transaksi non-tunai dalam layanan pariwisata dinilai belum efektif mulai dari kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana serta sistem pengawasan dan pengendaliannya. Pelaksanaan transaksi non-tunai ini belum efektif dalam pelaksanaannya karena masih dalam proses migrasi dari tunai ke non-tunai dan terkendala dari kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi serta petugas dan pengunjung belum paham cara transaksi non-tunai.

<sup>a b c</sup> Ilmu Administrasi Publik,  
Universitas Muhammadiyah Sinjai,  
Indonesia

## 1 Pendahuluan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sangat menyadari potensi wisata merupakan penunjang perekonomian, melihat Kabupaten Sinjai adalah salah satu kota yang sarat akan nilai budaya dan sejarah yang dianggap memiliki potensi wisata yang tinggi. Menyadari hal tersebut maka melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai bertugas untuk membenahi objek-objek wisata di Kabupaten Sinjai khususnya di masa pandemi saat ini. Berdasarkan Peraturan Kemenkes Nomor HK.01.07/MENKES/ 328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi Pandemi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka dalam rangka keamanan dan ketertiban operasional objek wisata di masa pandemi covid-19, Bupati Sinjai mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor 829 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan pada Objek wisata dalam masa libur lebaran Idul Fitri 1442 H Tahun 2021 di Kabupaten Sinjai yang isinya melakukan standar operasional prosedur (SOP) untuk pengunjung objek wisata di poin 7 bagian (h) menyiapkan aplikasi pembayaran non tunai sistem QRIS melalui aplikasi *sulselbar apps*, *link aja*, *ovo*, *gopay* dan lain-lain.

Pemerintah berkewajiban untuk bertindak demi kepentingan umum, bertanggung jawab, bermoral, dan sesuai dengan cita-cita demokrasi (Herizal, Mukhrijal, Wance, 2020), penyelenggaraan pemerintahan daerah, melibatkan aparatur dalam pengembangan sumber daya manusia, dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang (Selanno, Wance, 2022), peran pemerintah desa dalam memimpin masyarakat, peluang dan kesempatan masyarakat, serta sarana dan prasarana pendukung (Noya, 2022), ada sedikit fasilitas dan sedikit orang yang memahami komunitas (Irmawati, Wijaya, Basir, 2022), memastikan masyarakat berhak dan tidak diuntungkan, pemerintah selalu melakukan survei lapangan secara rutin (Asrin, Acmad, Sadat, 2022).

Surat edaran ini dikeluarkan untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 sehingga pembayaran yang dahulunya tunai beralih ke pembayaran non tunai. Sistem pembayaran non tunai merupakan sistem yang di dalamnya terdapat peraturan, teknis dan fasilitas sebagai sarana untuk proses penyampaian maupun instruksi pembayaran yang membantu kelancaran suatu pertukaran "nilai" antar perorangan maupun pihak lain dalam berkunjung ke objek wisata di Kabupaten Sinjai. Surat edaran ini telah diterapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sehingga pengunjung tidak membayar langsung di tempat wisata tapi melalui aplikasi, dan penerapan sistem transaksi non tunai yang bekerjasama dengan Bank Sulaweso Selatan Cabang Sinjai dan ini telah diterapkan di 3 (tiga) objek wisata yaitu: Taman Batu Pake Gojeng, Tahura dan Hutan Mangrove Tongke-tongke dan ini tahap percobaan.

Beberapa masalah-masalah yang cukup kompleks, diantara masalah tersebut yang cukup mendasar adalah kurangnya pengetahuan pengunjung dalam menggunakan aplikasi pembayaran non tunai serta terkadang gangguan jaringan dan juga perhatian pemerintah yang hanya terfokus pada penerapannya dan belum adanya sosialisasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam penggunaan aplikasi pembayaran non tunai. Sehingga hal ini menjadikan pengunjung mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi pembayaran non tunai ini. Adapun data hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sistem transaksi non tunai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Hasil Penerimaan PAD dari Sistem Transaksi Non Tunai

No.	Tempat Objek Wisata	Jumlah Pengunjung	Jumlah PAD
1.	Tahura	-	- (belum diterapkan)

2.	Hutan Mangrove Tongke- Tongke	31 Orang Dewasa 6 Anak	Rp. 156.010,- Rp. 18.000,-
3.	Taman Batu Pake Gojeng	8 orang Dewasa	40.000,-

Sumber Data: Diolah dari Disbudpar, 2021

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut diatas di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul “Efektivitas Sistem Transaksi Non Tunai dalam Layanan Pariwisata di Kabupaten Sinjai”

## 2 Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dengan metode deskriptif adalah metode riset yang digunakan untuk memperjelas gejala social melalui berbagai variable penelitian yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Penelitian ini dilakukan di dinas Pariwisata dan kebudayaan serta objek wisata yang ada dikabupaten sinjai. teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 3 Hasil dan Diskusi

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten sinjai melalui berbagai program atau kegiatan penilaian efektif atau tidaknya program yang direncanakan apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Efektivitas kerja sangat dibutuhkan dalam organisasi publik (Wance, 2018), Agar personel dapat memberikan layanan dengan sukses dan efisien, penting bagi mereka untuk memiliki pemahaman teknologi yang kuat (Ekram, Tuanaya, Wance, 2022).

### Kejelasan Tujuan Yang Hendak Dicapai

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya petugas dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. kejelasan tujuan yang ingin dicapai sudah cukup jelas karena bertujuan: 1) Era teknologi tinggi sekarang ini harus menjemput bola bahwa teknik komunikasi itu memudahkan segalanya dan tidak perlu lagi memegang uang secara tunai dalam jangka banyak apalagi hanya membayar beberapa karcis masuk di objek wisata cukup dengan menggunakan secara digital. 2) Era pandemi seperti ini menekankan untuk tidak selalu berinteraksi bukan tidak selalu berinteraksi dengan manusia paling tidak dari tangan petugas dengan tangan pengunjung tidak ada kontak fisik langsung. Jadi interaksi itu sudah tidak ada lagi, cukup petugas itu memperlihatkan bahwa petugas sudah menggunakan secara digital. 3) Teknologi komunikasi ketinggalan kalau tidak menggunakan teknologi, karena di pulau jawa hampir setiap objek wisata milik swasta dan yang pasti Kabupaten Sinjai berlahan-lahan tidak ada lagi pembayaran secara tunai. Namun kenyataannya kejelasan tujuan ini tidak terlaksana dengan baik karena masyarakat yang berkunjung ke objek wisata lebih banyak menggunakan pembayaran tunai dengan membeli karcis dibanding dengan transaksi non tunai dan juga belum adanya sosialisasi ke petugas jaga dan masyarakat sehingga penggunaan transaksi non tunai ini belum terlaksana secara maksimal.

### Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Kejelasan strategi pencapaian tujuan, strategi yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. Observasi didapatkan bahwa benar strategi untuk mencapai tujuan dari transaksi non tunai yaitu: mengurangi penyalahgunaan keuangan: kenapa dikatakan penyalahgunaan keuangan kalau untuk manual kan bisa

dimainkan, Menyalahi atau meminimalisir kebocoran pendapatan asli daerah. Merupakan perintah dari menteri keuangan kerjasama dengan menteri dalam negeri dan menteri pariwisata menggunakan transaksi non tunai agar segala aktivitas bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama bahwa kejadian-kejadian yang pernah dialami tidak akan pernah terjadi lagi pada era penggunaan transaksi non tunai atau Qris.

Observasi di objek wisata didapatkan bahwa benar petugas belum pernah diberikan sosialisasi cara menggunakan aplikasi Qris sehingga tidak mengetahui cara menggunakannya disamping itu di objek wisata Tahura jaringan tidak bisa menjangkau untuk menggunakan aplikasi ini sehingga masyarakat tetap menggunakan karcis retribusi objek wisata untuk berkunjung ke tahura. Diharapkan kedepannya diadakan pelatihan dalam rangka upgrading untuk peningkatan sumber daya manusia karena transaksi non tunai merupakan bentuk kemajuan, teknologi sehingga dapat mengoperasikan sistem dengan baik dan benar. Observasi di objek wisata didapatkan bahwa benar pengunjung tidak menggunakan aplikasi sistem non tunai dan lebih banyak memilih membayar tunai dengan membeli karcis retribusi pada petugas padahal di objek wisata hutan mangrove tongke-tongke sudah disiapkan scan barcode yang langsung di scan ketika ada pengunjung yang memakai aplikasi Qris dan bisa langsung menggunakannya.

Hasil pemaparan dan observasi di atas didapatkan bahwa petugas jaga dan pengunjung belum mengetahui strategi pencapaian dari tujuan transaksi non tunai dan sejauh ini pemerintah melalui dinas pariwisata dan kebudayaan memiliki strategi untuk mencapai tujuan dari transaksi non tunai yaitu: mengurangi penyalahgunaan keuangan, kenapa dikatakan penyalahgunaan keuangan kalau untuk manual kan bisa dimainkan, Menyalahi atau meminimalisir kebocoran pendapatan asli daerah dan merupakan perintah dari menteri keuangan kerjasama dengan menteri dalam negeri dan menteri pariwisata menggunakan transaksi non tunai agar segala aktivitas bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama bahwa kejadian-kejadian yang pernah dialami tidak akan pernah terjadi lagi pada era penggunaan transaksi non tunai atau Qris.

### **Perencanaan Yang Matang**

Perencanaan yang matang, pada hakekatnya dengan memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh instansi dimasa depan. Pelaksanaan transaksi non tunai ini dilakukan dengan perencanaan yang matang dimana pihak sulsebar yang mengadakan audiens dengan Bupati Sinjai, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pihak Bapenda dan teman-teman di pariwisata dalam hal pembahasan transaksi non tunai ini kedepannya dan sudah tertuang pada peraturan perundang-undangan yang harus kita ikuti. Dan semua transaksi memudahkan dan membuat nyaman tidak lagi memegang uang tunai seadanya saja dengan harapan pendapatan asli daerah lebih dimaksimalkan dari pelaksanaan transaksi non tunai ini. Namun yang terjadi pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dimana di objek wisata Tahura Sinjai Borong sampai saat ini belum diterapkan transaksi non tunai karena terkendala dengan tidak pernahnya diberikan sosialisasi ke petugas jaga dan juga tidak didukung dengan sarana dan prasarana operasional yang belum memadai sehingga belum sama sekali dilaksanakan transaksi non tunai di wisata Tahura.

### **Penyusunan Program Yang Tepat**

Penyusunan program yang tepat. Suatu rencana masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat agar para pelaksana memiliki pedoman bertindak dan bekerja. Penyusunan program dalam pelaksanaannya belum tepat dimana belum adanya sosialisasi ke pengunjung atau masyarakat tentang transaksi non tunai ini sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan transaksi tunai dari pada non tunai. Namun pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setiap perencanaan dan program pasti ada tahap-tahap atau step-stepnya dan hanya satu saja keinginan pemerintah daerah untuk memudahkan transaksi harus menggunakan Qris. Dan untuk kedepan nanti walaupun pihak swasta mempunyai atau pihak desa tempat wisata diharapkan juga bisa menerapkan hal itu. Jadi bukan hanya pariwisata atau objek wisata milik pemerintah daerah Sinjai tapi seluruh tempat wisata atau objek wisata nanti akan kami dorong atau arahkan menggunakan aplikasi Qris.

### **Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja**

Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dalam transaksi non tunai. Sarana yang ada di objek wisata ada barcode yang jelas ada smartphone dan menggunakan aplikasi seperti Qris atau ovo namun objek wisata Tahura tidak ada sarana dan prasarana seperti wifi untuk menggunakan hp android atau smartphone dan tidak adanya sosialisasi ke petugas jaga sehingga petugas jaga juga tidak bisa memberikan informasi ke pengunjung cara menggunakan aplikasi transaksi non tunai ini dan pengunjung tetap menggunakan transaksi tunai dan belum ada sama sekali yang menggunakan transaksi non tunai.

### **Sistem Pengawasan dan Pengendalian**

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas instansi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dilakukan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai melalui himbauan untuk mendorong ke petugas objek wisata dalam menerapkan transaksi non tunai melalui aplikasi Qris tanpa transaksi tunai tapi pada kenyataannya transaksi non tunai ini belum sepenuhnya digunakan dan lebih banyak pengunjung masih menggunakan transaksi tunai. Pengawasan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa himbauan untuk mendorong kepada petugas objek wisata untuk menggunakan secara transaksi non tunai namun dalam pelaksanaannya pengawasan dilakukan dari pihak objek wisata dalam memeriksa transaksi yang digunakan dalam berkunjung baik transaksi non tunai maupun tunai dan sejauh pengawasan masih kurang dalam pelaksanaan transaksi non tunai ini.

### **4 Kesimpulan**

Efektivitas Sistem transaksi non tunai dalam layanan pariwisata didapatkan bahwa belum efektif mulai dari Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, Kejelasan strategi pencapaian tujuan, Perencanaan yang matang, Penyusunan program yang tepat, Tersedianya sarana dan prasarana serta Sistem pengawasan dan pengendalian. Pelaksanaan transaksi non tunai ini belum efektif dalam pelaksanaannya karena masih dalam proses migrasi dari tunai ke non tunai sehingga belum efektif karena masyarakat belum mengetahui tentang pembayaran transaksi non tunai di Objek Wisata

### **Referensi**

- Abdul Kadir. (2003.) *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Asrin, A., Acmad, F. Y., & Sadat, A. (2022). Evaluasi Kebijakan BPNT Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Baadia Kota Baubau. *Journal of Government Science Studies*, 1(2), 86-94.
- Ali Marsuki, dkk. (2020). *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi 4* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai.
- Ekram, I., Tuanaya, W., & Wance, M. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik Kantor Manunggal Satu Atap Provinsi Maluku. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(1), 1-13.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.
- Mangani, K.S. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. (2000). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- Noya, J. (2022). Proses Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Pada Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. *Journal of Government Science Studies*, 1(2), 95-104.
- Pendit. (2002). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Pohan, Aulia. (2011). *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi Di Indonesia*: Jakarta: Rajawali Pers.
- Pohan, H.G. dan N.T. Antara. (2001). *Pengaruh Penambahan Madu dan Asam Sitrat Terhadap Karakteristik Minuman Fungsional dari Sari Buah Mengkudu*. (4) : 11–20. Forum Komunikasi

IHP.

- Pramono, B. Dkk. (2006). *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian Dan Kebijakan Moneter*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Prawirosentono, Suyadi. (1999). *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Radiah Sitti, (2011). *Skripsi Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan di Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*. STISIP Muhammadiyah Sinjai.
- Sedarmayanti, (2009). *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Selanno, H., & Wance, M. (2021). Performance Of Inspectorate In Supervision Of Government Administration In Buru Selatan Regency. *Sosiohumaniora*, 23(2), 189-157.
- Simamora, Henry. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIEYKPN.
- Sumarwan, Ujang. (2015). *Perilaku Konsumen Teori Penerapannya Dalam Pemasaran Edisi Kedua*. Cetakan Ketiga. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Spillane. (2016). *Pengembangan Pariwisata Dalam Konteks Pembangunan Wilayah*. Online dari <http://www.radarplanologi.com>. Diakses tanggal 12 januari 2021.
- Untoro, J. (2014). *Audit Energi dan Analisis Penghematan Konsumsi Energi pada Sistem Peralatan Listrik*. Jakarta: Wahyu Media
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- ....., Hoy dan Miskel. (2003). *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung. Alfabeta.
- Yoeti, Oka. A. (2000). *Ekowisata: Pariwisata Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT. Pertja
- Wijaya, A. A. M., & Basir, M. A. (2022). Transparansi Pelayanan Publik dalam Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari Kota Baubau. *Journal of Government Science Studies*, 1(2), 50-57.
- Wance, M. (2018). Efektivitas Pelayanan Transportasi Publik (Studi Pelayanan Pt Asdp Pelabuhan Bastiong Tahun 2017). *Jurnal Of Government (JOG)*, 3(2).

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2013 tentang *Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kabupaten Sinjai*
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 73 Tahun 2016 tentang *Susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*.
- Peraturan Kemenkes Nomor HK.01.07/MENKES/ 328/2020 tentang *Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi Pandemi*
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang *Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- Surat Edaran Bupati Sinjai Nomor 829 Tahun 2021 tentang *Penerapan Protokol Kesehatan pada Objek wisata dalam masa libur lebaran Idul Fitri 1442 H Tahun 2021 di Kabupaten Sinjai*